Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah

Haidar Adam¹

Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
mazhaidar@yahoo.co.id

Abstract

The legal status of community organizations (ormas) is a crucial component of Indonesia's legal system, representing the role of civil society. Ormas serve not only as a platform for public participation but also as a social watchdog for government policies. From a juridical perspective, the existence of ormas is regulated under Law No. 16 of 2017, which guarantees freedom of association while imposing limits to prevent abuse of authority. Furthermore, the legal status of ormas registered as legal entities ensures certainty and protection for their activities. However, regulations on the dissolution of ormas pose challenges, particularly in ensuring the principles of justice, transparency, and human rights protection. Therefore, balanced oversight is essential to maintain the supportive role of ormas in democracy while aligning with constitutional values.

Keywords: *Legal status, community organizations, human rights, civil society*

Abstrak

Kedudukan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan komponen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berperan sebagai representasi civil society. Ormas tidak hanya menjadi wadah partisipasi masyarakat, tetapi juga bertindak sebagai pengawas sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dalam perspektif yuridis, keberadaan ormas diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menjamin kebebasan berserikat, sekaligus memberikan batasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kedudukan hukum ormas yang terdaftar sebagai badan hukum memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi aktivitasnya. Namun, regulasi terkait pembubaran ormas menimbulkan tantangan, terutama dalam memastikan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang seimbang agar peran ormas tetap mendukung demokrasi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

Kata Kunci: Kedudukan hukum, organisasi kemasyarakatan, hak asasi manusia, civil society

Pendahuluan

Organisasi kemasyarakatan, yang sering dikenal sebagai ormas, merupakan bagian integral dari civil society yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Keberadaan ormas menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Corresponding Author

Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif hukum, kedudukan ormas memiliki dimensi yang luas karena mencakup aspek legal formal, pengaturan administratif, dan dampak sosialnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menjadi landasan hukum utama, mendefinisikan ormas sebagai organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pandeiro, 2019).

Kedudukan hukum ormas sering dikaitkan dengan tiga ranah kehidupan bersama, yaitu negara, masyarakat, dan pasar. Ormas menjadi aktor yang dapat bekerja secara independen atau kolaboratif dengan pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari advokasi kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga layanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ormas tidak hanya memiliki kedudukan sebagai pelengkap dalam sistem kenegaraan, tetapi juga sebagai pengimbang kekuasaan dan fasilitator aspirasi masyarakat (Amer, n.d.-a).

Namun, keberadaan ormas tidak lepas dari tantangan hukum dan regulasi. Sebagai entitas hukum, ormas harus memenuhi persyaratan legal formal untuk mendapatkan pengakuan badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta mengatur ruang gerak ormas agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, ormas yang didirikan oleh warga negara asing juga tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tidak bertentangan dengan kedaulatan negara (Amer, n.d.-b).

Pada sisi lain, kebebasan yang diberikan kepada ormas tidak dapat dilepaskan dari prinsip tanggung jawab hukum. Ormas yang menyimpang dari tujuan awalnya atau yang melanggar hukum dapat dibubarkan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebagai manifestasi kebebasan berserikat yang dilindungi oleh konstitusi, pembubaran ormas harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas serta dampaknya terhadap hak asasi manusia (Rahayu et al., 2021; Sumartini et al., 2022).

Dalam perspektif hukum modern, ormas juga dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum positif dan politik hukum harus mampu menciptakan regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif, untuk mendukung peran ormas sebagai motor penggerak perubahan sosial. Regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman menjadi penting untuk memastikan bahwa ormas dapat terus relevan dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, kajian mengenai kedudukan hukum ormas tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh ormas dalam pembangunan bangsa. Perspektif ini mendorong pemahaman yang lebih holistik tentang peran ormas sebagai elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hartono, 2023).

Kedudukan Hukum Ormas di Indonesia

Kedudukan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia telah menjadi topik penting dalam kajian hukum dan politik, terutama setelah

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Ormas memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyampaikan aspirasi mereka. UU Ormas mengatur hak dan kewajiban ormas, serta memberikan kerangka hukum yang jelas untuk keberadaan dan aktivitas mereka. Dalam konteks ini, analisis terhadap UU No. 16 Tahun 2017 sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi ini mempengaruhi kedudukan hukum ormas dan peran mereka dalam sistem hukum positif di Indonesia (Antika, 2022).

1. Analisis UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) menjadi salah satu peraturan yang sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. UU ini disahkan untuk memberikan landasan hukum bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, baik itu ormas yang berbasis sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. UU ini juga merupakan revisi dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang dianggap memiliki beberapa kelemahan dalam implementasinya.

Salah satu tujuan utama UU Ormas ini adalah untuk mengatur dan memberi batasan terhadap ormas dalam menjalankan kegiatan, serta memastikan bahwa kegiatan ormas tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Dalam pasal pertama, UU ini mendefinisikan ormas sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela, berdasarkan kesamaan tujuan dan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, negara, dan bangsa, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Pada dasarnya, UU Ormas No. 16/2017 menekankan pentingnya ormas sebagai elemen masyarakat yang memiliki peran vital dalam pembangunan negara. Ormas memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, membantu pemerintah dalam pembangunan sosial, serta mengembangkan potensi masyarakat. Akan tetapi, UU ini juga memuat aturan-aturan yang ketat mengenai batasan dan kontrol terhadap ormas yang berpotensi merugikan kepentingan negara, seperti ormas yang memiliki orientasi radikal atau bertentangan dengan Pancasila dan ideologi negara (Utami & Sugitanata, 2024).

Beberapa ketentuan dalam UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pasal 59, UU Ormas memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peringatan terhadap ormas yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan, serta memberikan hak kepada pemerintah untuk membubarkan ormas jika dianggap telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan negara. Namun, keputusan pembubaran ormas ini harus melalui mekanisme pengadilan, yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam proses tersebut.

Salah satu masalah yang muncul dari UU ini adalah potensi penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam membubarkan ormas. Beberapa kritikus menganggap bahwa aturan tersebut bisa digunakan untuk membatasi kebebasan

berekspresi dan berkumpul bagi kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Hal ini berpotensi mengancam prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun, di sisi lain, UU Ormas ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk menanggulangi ormas yang berpotensi merusak ketertiban umum dan menentang ideologi negara (Prayudi et al., 2022).

Di sisi hak dan kewajiban ormas, UU Ormas mengatur bahwa ormas berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan anggota organisasi. Ormas juga berhak untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik, melakukan kegiatan sosial, dan membangun jaringan kerjasama dengan pihak lain. Sementara itu, ormas juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara, dan memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar hak asasi manusia.

UU ini juga menegaskan bahwa ormas tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa, seperti kegiatan terorisme atau separatisme. Dalam hal ini, UU Ormas memberikan kewajiban kepada ormas untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara. Salah satu kewajiban penting lainnya adalah bahwa ormas harus mendaftarkan diri ke pemerintah agar dapat memperoleh status badan hukum, yang memberikan perlindungan hukum lebih kuat dalam menjalankan kegiatan.

Secara keseluruhan, UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas berusaha menciptakan keseimbangan antara memberikan kebebasan bagi ormas untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, dengan memastikan bahwa ormas tidak melakukan kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan terhadap ormas menjadi salah satu aspek yang diatur dalam UU ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ormas tetap dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum negara.

Namun, keberhasilan dari penerapan UU Ormas ini sangat bergantung pada implementasi yang adil dan transparan. Jika kebijakan pemerintah diterapkan dengan benar dan tidak disalahgunakan, maka UU ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, jika implementasinya tidak hati-hati, UU ini dapat mengarah pada pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, yang pada akhirnya justru merugikan demokrasi dan pluralisme yang merupakan dasar kehidupan berbangsa di Indonesia.

2. Hak dan Kewajiban Ormas dalam Hukum Positif

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai bagian dari civil society, ormas berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat, penyuluh pendidikan, serta mitra pemerintah dalam berbagai program pembangunan sosial dan politik. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban ormas diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, yang menggantikan UU No. 17 Tahun 2013.

UU Ormas memberi sejumlah hak kepada ormas yang terdaftar dan memenuhi syarat hukum. Pertama, ormas berhak untuk memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan diri kepada pemerintah. Hal ini memberikan ormas kapasitas hukum untuk melakukan aktivitas, mengelola dana, dan bekerja sama

dengan pihak lain, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ormas juga berhak menyuarakan pendapat, melakukan kegiatan sosial, dan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan bidang yang digeluti oleh ormas tersebut. Dalam konteks ini, hak berorganisasi dan berkumpul dijamin oleh konstitusi Indonesia, yang mendasarkan pada kebebasan berpendapat dan berserikat (Trinanda, 2020).

Ormas juga memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun materiil, untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan anggaran dasar mereka. Selain itu, ormas berhak untuk mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat mendukung pencapaian tujuan mereka. Dalam hal ini, peran ormas dalam masyarakat demokratis sangat penting karena mereka dapat berfungsi sebagai penjaga keseimbangan sosial dan berperan dalam kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, ormas juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Jika ormas mendapatkan ancaman atau gangguan dalam pelaksanaan aktivitasnya, mereka berhak untuk memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap ormas yang secara sah beroperasi di Indonesia, dengan menghindari segala bentuk intervensi yang tidak sah terhadap kegiatan yang dilakukan ormas, selama ormas tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Priyono & Nilamsari, 2021).

Di balik hak-hak yang diberikan, ormas juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Salah satu kewajiban utama yang diatur dalam UU Ormas adalah kewajiban untuk mendaftar dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum agar dapat memperoleh hak-haknya secara sah. Ormas yang tidak terdaftar tidak diakui oleh negara dan dapat menghadapi sanksi hukum jika melanjutkan aktivitasnya. Pendaftaran ormas ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh ormas.

Selain itu, ormas diwajibkan untuk tidak bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila, dan UUD 1945. Hal ini berarti ormas harus menjaga agar semua kegiatan dan tujuan yang mereka jalankan tidak merugikan negara atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Ormas yang ditemukan terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila atau merusak integritas negara, seperti terorisme, separatisme, atau tindakan kekerasan, dapat dibubarkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Ormas (Ghufranillah & Wahyuni, 2022).

Ormas juga berkewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Mereka tidak boleh menggelar kegiatan yang mengancam ketertiban umum, serta harus selalu mengedepankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Ormas harus memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan tidak menciptakan polarisasi atau perpecahan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak untuk memberikan peringatan, bahkan membubarkan ormas, jika mereka terlibat dalam kegiatan yang merugikan negara atau melanggar hukum yang berlaku.

UU No. 16 Tahun 2017 juga mengatur kewajiban ormas dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Ormas wajib membuat laporan keuangan secara

periodik dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemerintah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa ormas tidak menyalahgunakan sumber daya yang mereka miliki dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sah dan transparan.

Hak dan kewajiban ormas dalam hukum positif Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi dan pengawasan yang ketat. Dalam hal hak, UU Ormas memberikan landasan bagi ormas untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Namun, seiring dengan hak tersebut, ormas juga dibebani kewajiban untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan ormas harus selaras dengan tujuan negara, yakni untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Shofiyah et al., 2024).

Salah satu kewajiban yang menonjol adalah kewajiban untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sangat penting, karena keberadaan ormas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara bisa membahayakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, kontrol terhadap ormas yang berpotensi merusak negara menjadi salah satu aspek yang perlu diawasi oleh pemerintah.

Di sisi lain, hak ormas untuk mengorganisir diri dan berpartisipasi dalam kehidupan publik juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia. Ormas berperan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memberikan alternatif suara yang tidak selalu terwakili oleh partai politik. Dengan demikian, ormas berfungsi sebagai sarana penyaring dan pendamping kebijakan publik yang dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adil.

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban ormas dalam hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi ormas untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus memastikan bahwa ormas beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan. Namun, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan ini secara adil dan bijaksana, agar hak ormas tidak disalahgunakan, dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, ormas dapat berfungsi dengan optimal sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia (Wardi, 2019).

Analisis Ormas dalam Perspektif Siyasah Islam

Siyasah Islam, atau lebih dikenal dengan politik Islam, memiliki prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi umat Islam, termasuk dalam konteks membangun organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas), memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan umat, memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di berbagai sektor kehidupan. Dalam perspektif Islam, pembentukan dan pengelolaan Ormas tidak lepas dari prinsip-prinsip siyasah syariyyah yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan persatuan umat (Pulungan, 2014).

Salah satu prinsip utama siyasah Islam dalam membangun organisasi masyarakat adalah keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil harus berdasarkan keadilan tanpa memandang golongan, suku, atau latar belakang sosial ekonomi. Dalam konteks organisasi masyarakat,

keadilan ini tercermin dalam pembagian tugas dan wewenang yang merata, serta dalam pemberian hak yang sama bagi setiap anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Keberadaan ormas dalam perspektif Islam bukan hanya untuk membela kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan umum yang lebih luas, termasuk masyarakat Muslim secara keseluruhan dan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya.

Prinsip maslahat atau kemaslahatan umat juga merupakan pilar penting dalam siyasah Islam yang harus diterapkan dalam membangun organisasi masyarakat. Organisasi yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam siyasah syariyyah, tujuan utama dari organisasi masyarakat adalah untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat, dengan memperhatikan maslahat umat dan menghindari kerusakan. Dalam menjalankan organisasi, prinsip maslahat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Oleh karena itu, organisasi yang dibangun harus memiliki visi dan misi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian kepentingan sempit, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan umat (Jazuli, 2023).

Selanjutnya, kebebasan berorganisasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam siyasah Islam. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berkumpul dan berorganisasi selama tujuan dan aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa umat Islam memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, asalkan tujuan tersebut tidak merugikan orang lain atau bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, prinsip kebebasan ini tidak berarti bahwa ormas bisa beroperasi tanpa batasan, melainkan tetap harus dalam koridor hukum syariat Islam dan hukum negara yang berlaku. Ormas harus memastikan bahwa kegiatannya tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar Islam seperti larangan terhadap tindakan kekerasan, penindasan, dan perpecahan.

Tanggung jawab sosial adalah prinsip lain yang sangat penting dalam membangun organisasi masyarakat dalam perspektif siyasah Islam. Ormas harus mampu mengambil peran sebagai penggerak perubahan sosial yang positif, serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Tanggung jawab sosial ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, hingga pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh, banyak organisasi masyarakat Islam yang menjalankan kegiatan sosial seperti membantu korban bencana, mendirikan sekolah, atau memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin. Hal ini tidak hanya menjadi wujud implementasi dari prinsip tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi terhadap tercapainya tujuan negara yang adil dan sejahtera (Khoiriyah, 2019).

Siyasah Islam juga mengajarkan prinsip musyawarah dan mufakat, yang merupakan proses pengambilan keputusan secara kolektif dengan melibatkan semua pihak terkait. Dalam konteks organisasi masyarakat, prinsip ini mencerminkan budaya demokrasi yang sehat, di mana setiap anggota organisasi memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak, serta untuk menjaga

kesatuan dan persatuan dalam organisasi. Melalui prinsip musyawarah, organisasi masyarakat dapat memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat umat, serta dapat menghindari adanya dominasi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bisa merusak keharmonisan dalam organisasi.

Namun, penerapan prinsip-prinsip siyasah Islam dalam membangun organisasi masyarakat juga harus memperhatikan aspek keselarasan dengan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, hukum positif yang mengatur ormas adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU tersebut, ormas diwajibkan untuk tunduk pada prinsip-prinsip dasar negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, serta harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, organisasi yang didirikan dalam kerangka siyasah Islam harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariat Islam.

Prinsip-prinsip siyasah Islam juga mengajarkan tentang integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi masyarakat. Setiap ormas harus dikelola dengan cara yang jujur dan transparan, serta akuntabel dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, ormas harus memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak disalahgunakan. Organisasi yang tidak transparan atau tidak akuntabel dapat merusak reputasi dan menghilangkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga menurunkan efektivitas dan kredibilitas organisasi tersebut.

Dalam prakteknya, prinsip-prinsip siyasah Islam ini dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis organisasi masyarakat, mulai dari organisasi sosial, pendidikan, keagamaan, hingga organisasi politik. Sebagai contoh, ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan, yang tidak hanya mengedepankan kepentingan internal, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Begitu pula dengan ormas-ormas Islam lainnya yang berfokus pada pemberdayaan umat, menjaga kestabilan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Amer. Nabih & Gobel, 2019).

Dalam sistem demokrasi yang sehat, keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan organisasi masyarakat (ormas) merupakan hal yang sangat penting. Negara sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat mengabaikan peran vital organisasi kemasyarakatan, yang juga memiliki hak untuk berorganisasi dan menyuarakan aspirasi mereka. Namun, dalam kerangka hukum, khususnya di Indonesia, keseimbangan ini harus dijaga agar tidak ada pihak yang mendominasi atau sebaliknya, ormas tidak beroperasi tanpa batasan yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahaminya dalam perspektif hukum positif dan juga dari sisi prinsip-prinsip siyasah Islam.

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan untuk memastikan bahwa kegiatan ormas sesuai dengan tujuan negara dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Salah satu peraturan penting yang mengatur keberadaan ormas adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk mengontrol aktivitas ormas,

termasuk mekanisme pembubaran ormas yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan ideologi negara. Negara juga harus menjamin bahwa ormas dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan peran sosialnya, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sosial yang positif.

Namun, otoritas negara ini tidak bersifat mutlak. Negara harus menjaga agar intervensinya tidak mengarah pada pembatasan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berorganisasi yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip siyasah Islam menekankan bahwa negara memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk berkumpul dan berserikat, selama aktivitas ormas tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau merusak tatanan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif siyasah Islam, kebebasan berorganisasi adalah hak yang harus dijamin oleh negara, namun dengan batasan tertentu yang selaras dengan prinsip syariat Islam. Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk membentuk organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi umat, baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, maupun ekonomi. Prinsip kebebasan ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengakui hak umat Islam untuk berserikat dan berkumpul demi mencapai tujuan yang baik dan maslahat. Namun, kebebasan ini tidak berarti bahwa ormas dapat bergerak tanpa batasan, melainkan harus selalu berada dalam koridor hukum syariat yang menjaga kedamaian dan kesejahteraan umat.

Dalam konteks ini, ormas dapat berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, memberikan pendidikan, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan sosial. Misalnya, ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga-lembaga sosial yang sangat membantu masyarakat. Namun, prinsip kebebasan ini juga mengharuskan ormas untuk tidak melakukan tindakan yang merusak keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan utama dalam hubungan antara negara dan ormas adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara otoritas negara yang harus mengatur kehidupan masyarakat dan kebebasan ormas dalam berorganisasi. Dalam beberapa kasus, negara dapat mengambil langkah yang lebih jauh dengan membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial. Proses pembubaran ini biasanya dilakukan berdasarkan penilaian terhadap aktivitas ormas yang dianggap mengancam keamanan negara, misalnya, ormas yang terlibat dalam tindak kekerasan atau radikalisme.

Namun, kebebasan berorganisasi adalah hak dasar yang tidak boleh dicabut tanpa alasan yang jelas dan sah. Di sinilah pentingnya negara untuk memastikan bahwa kebijakan pembubaran ormas tidak disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat atau membatasi hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan ormas hanya dapat dilakukan jika organisasi tersebut terbukti secara jelas melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau mengancam keselamatan dan ketertiban umum. Dalam hal ini, negara harus berhati-hati agar tidak jatuh pada praktik otoritarianisme yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam prinsip siyasah Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan umat dan mencegah kerusakan. Negara tidak boleh terlalu jauh dalam membatasi kebebasan ormas, tetapi juga harus tegas dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ormas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Prinsip keadilan dalam siyasah Islam mengharuskan bahwa kebijakan yang diambil oleh negara harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat serta memperhatikan kepentingan umum. Dalam hal ini, negara dapat bekerja sama dengan ormas untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki kualitas pendidikan, dan menjaga keamanan.

Musyawarah dan mufakat juga merupakan bagian integral dari prinsip siyasah Islam, yang memungkinkan adanya dialog antara negara dan ormas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dialog ini sangat penting untuk menemukan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, serta untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, apabila terjadi konflik antara negara dan ormas terkait kebijakan tertentu, musyawarah dan dialog dapat menjadi jalan tengah untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan organisasi masyarakat (ormas) merupakan hal yang sangat penting. Negara sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat mengabaikan peran vital organisasi kemasyarakatan, yang juga memiliki hak untuk berorganisasi dan menyuarakan aspirasi mereka. Namun, dalam kerangka hukum, khususnya di Indonesia, keseimbangan ini harus dijaga agar tidak ada pihak yang mendominasi atau sebaliknya, ormas tidak beroperasi tanpa batasan yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahaminya dalam perspektif hukum positif dan juga dari sisi prinsip-prinsip siyasah Islam.

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan untuk memastikan bahwa kegiatan ormas sesuai dengan tujuan negara dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Salah satu peraturan penting yang mengatur keberadaan ormas adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk mengontrol aktivitas ormas, termasuk mekanisme pembubaran ormas yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan ideologi negara. Negara juga harus menjamin bahwa ormas dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan peran sosialnya, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sosial yang positif.

Namun, otoritas negara ini tidak bersifat mutlak. Negara harus menjaga agar intervensinya tidak mengarah pada pembatasan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berorganisasi yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip siyasah Islam menekankan bahwa negara memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk berkumpul dan berserikat, selama aktivitas ormas tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau merusak tatanan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif siyasah Islam, kebebasan berorganisasi adalah hak yang harus dijamin oleh negara, namun dengan batasan tertentu yang selaras dengan prinsip syariat Islam. Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk membentuk

organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi umat, baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, maupun ekonomi. Prinsip kebebasan ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengakui hak umat Islam untuk berserikat dan berkumpul demi mencapai tujuan yang baik dan maslahat. Namun, kebebasan ini tidak berarti bahwa ormas dapat bergerak tanpa batasan, melainkan harus selalu berada dalam koridor hukum syariat yang menjaga kedamaian dan kesejahteraan umat.

Dalam konteks ini, ormas dapat berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, memberikan pendidikan, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan sosial. Misalnya, ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga-lembaga sosial yang sangat membantu masyarakat. Namun, prinsip kebebasan ini juga mengharuskan ormas untuk tidak melakukan tindakan yang merusak keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan utama dalam hubungan antara negara dan ormas adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara otoritas negara yang harus mengatur kehidupan masyarakat dan kebebasan ormas dalam berorganisasi. Dalam beberapa kasus, negara dapat mengambil langkah yang lebih jauh dengan membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial. Proses pembubaran ini biasanya dilakukan berdasarkan penilaian terhadap aktivitas ormas yang dianggap mengancam keamanan negara, misalnya, ormas yang terlibat dalam tindak kekerasan atau radikalisasi.

Namun, kebebasan berorganisasi adalah hak dasar yang tidak boleh dicabut tanpa alasan yang jelas dan sah. Di sinilah pentingnya negara untuk memastikan bahwa kebijakan pembubaran ormas tidak disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat atau membatasi hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan ormas hanya dapat dilakukan jika organisasi tersebut terbukti secara jelas melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau mengancam keselamatan dan ketertiban umum. Dalam hal ini, negara harus berhati-hati agar tidak jatuh pada praktik otoritarianisme yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam prinsip siyasah Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan umat dan mencegah kerusakan. Negara tidak boleh terlalu jauh dalam membatasi kebebasan ormas, tetapi juga harus tegas dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ormas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Prinsip keadilan dalam siyasah Islam mengharuskan bahwa kebijakan yang diambil oleh negara harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat serta memperhatikan kepentingan umum. Dalam hal ini, negara dapat bekerja sama dengan ormas untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki kualitas pendidikan, dan menjaga keamanan.

Musyawarah dan mufakat juga merupakan bagian integral dari prinsip siyasah Islam, yang memungkinkan adanya dialog antara negara dan ormas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dialog ini sangat penting untuk menemukan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, serta untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagai contoh, apabila terjadi konflik antara negara dan ormas terkait kebijakan tertentu, musyawarah dan dialog dapat menjadi jalan tengah untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Prayudi, 2018).

Komparasi Hukum Positif dan Prinsip Siyasah

Prinsip siyasah syar'iyah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan berdasarkan maqasid syariah (tujuan syariah), yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (dharuriyyat) (Harahap, 2022). Prinsip ini seringkali dijadikan dasar normatif untuk menilai regulasi nasional, terutama terkait pengelolaan negara dan masyarakat. Regulasi nasional di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), menjadi salah satu titik analisis yang relevan. Regulasi nasional berakar pada hukum positif yang bersifat sekuler, sedangkan prinsip siyasah syar'iyah merujuk pada ajaran Islam dalam mengatur masyarakat secara adil berdasarkan syariah (Suyanto, 2022).

Salah satu elemen utama dari regulasi nasional adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM). UU No. 16/2017, yang mengatur tentang pembubaran Ormas, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terhadap keamanan nasional atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini selaras dengan prinsip dharuriyyat dalam maqasid syariah, yakni menjaga agama dan keamanan (hifz al-din wa al-nafs). Regulasi ini menjamin kebebasan masyarakat untuk berorganisasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yang dalam perspektif siyasah syar'iyah sejalan dengan konsep kemaslahatan umum (masalah ammah) (Latifah, 2020).

Namun, perbedaan mencolok muncul pada pendekatan hukum positif Indonesia, yang sering menggunakan mekanisme top-down dalam pembubaran Ormas. UU No. 16/2017 memberikan kewenangan besar kepada pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung, untuk membubarkan Ormas tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Dalam siyasah syar'iyah, keadilan (al-'adl) adalah prinsip yang utama. Oleh karena itu, proses semacam ini bisa dianggap tidak sesuai dengan siyasah syar'iyah, yang menekankan pada prinsip musyawarah (shura) dan transparansi sebelum menjatuhkan keputusan (Farida, 2021; Winata, 2018).

Siyasah syar'iyah menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Regulasi nasional seperti UU No. 16/2017 cenderung lebih mengutamakan kepentingan umum, terkadang dengan mengabaikan aspek-aspek hak individu seperti kebebasan berorganisasi. Dalam siyasah syar'iyah, kebebasan berorganisasi merupakan bagian dari hak asasi yang perlu dijaga, selama organisasi tersebut tidak merusak kemaslahatan umum. Regulasi nasional perlu lebih harmonis dalam hal ini, dengan menjamin hak individu tanpa mengabaikan kepentingan nasional (Ardila, 2021; Sabri & Hasan, 2020).

Prinsip siyasah syar'iyah mengharuskan semua kebijakan dan regulasi memenuhi aspek dharuriyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat (pendukung), dan tahsiniyyat (penyempurna). Dalam UU Ormas, pembubaran organisasi didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk melindungi keamanan nasional (dharuriyyat) (Khasanah, 2019). Namun, seringkali aspek hajiyyat dan tahsiniyyat seperti dialog dengan Ormas bersangkutan diabaikan, sehingga kebijakan yang diambil tidak

sepenuhnya mencerminkan keseimbangan maqasid syariah (Suhendra & Rahman, 2021).

Harmonisasi antara hukum siyasah dan hukum positif merupakan kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya di Indonesia yang memiliki basis hukum pluralistik. Hukum siyasah sebagai cabang fikih yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik dalam Islam, menawarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dapat diterapkan pada regulasi hukum positif. Di sisi lain, hukum positif adalah produk negara yang disusun untuk mengatur kehidupan masyarakat secara universal, tanpa mengabaikan keberagaman agama dan budaya (Aulia, 2021; BASO, 2021; Maulana, 2023; Sari, 2022).

Hukum siyasah berakar pada maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini dapat mendukung pembentukan hukum positif yang menjamin keadilan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, misalnya, telah mengintegrasikan pendekatan ini dengan memastikan aspek dharuriyyat (kebutuhan mendasar), hajiyyat (kebutuhan tambahan), dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap) dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (Samud, 2018).

Proses harmonisasi menghadapi tantangan seperti perbedaan paradigma hukum. Hukum siyasah berbasis pada wahyu dan tradisi, sedangkan hukum positif berbasis pada rasionalitas manusia dan konsensus sosial. Selain itu, penerapan hukum siyasah sering kali terhambat oleh stigma bahwa ia hanya relevan dalam konteks teokrasi, padahal prinsip-prinsipnya bersifat universal. Kendala lainnya adalah kesenjangan dalam literasi masyarakat tentang hukum syariah dan hukum positif, yang sering kali menyebabkan kesalahpahaman (Slamet, n.d.).

Kesimpulan

Kedudukan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam perspektif hukum menegaskan perannya sebagai elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai wujud dari kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, ormas berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penjaga keseimbangan kekuasaan, dan penyampai aspirasi publik.

Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum untuk memastikan aktivitas ormas tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai konstitusi. Namun, tantangan seperti penyalahgunaan peran ormas, potensi konflik dengan otoritas negara, dan pengaturan pembubaran ormas memerlukan pendekatan hukum yang adil, transparan, dan proporsional. Dengan demikian, keberadaan ormas tidak hanya berkontribusi dalam penguatan civil society, tetapi juga menjadi cerminan dari demokrasi yang sehat dan inklusif

Referensi

Amer, N. (n.d.-a). ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM . *JEL : Jurnal Legalitas*, 15(1), 1–15.

Amer, N. (n.d.-b). ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM . *JEL : Jurnal Legalitas*, 15(1), 1–15.

- Amer. Nabih, & Gobel, R. T. S. (2019). Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah dan Negara Hukum . *Al-Mizan* , 15(2), 244–267.
- Antika, D. F. (2022). *Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* [Thesis S1]. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Ardila, F. (2021). *TINJAUAN SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PEMBATASAN PENGAJIAN (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 250/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah)* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY .
- Aulia, N. (2021). *ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP HARMONISASI LEGISLASI HUKUM DI INDONESIA* [Thesis S1]. Universitas Islam Negeri.
- BASO. (2021). *Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia* [Thesis S1]. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Farida, A. (2021). Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Surat Keputusan (Beschikking). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 170–197.
- Ghufranillah, D., & Wahyuni, S. (2022). Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat. *Res Publica*, 6(3), 346–355.
- Harahap, S. (2022). SIYASAH SYARI'YAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM . *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* , 5(2), 112–127.
- Hartono. (2023). ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA . *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Jazuli, M. K. (2023). *TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Kota Blitar)* [Thesis S1]. Universitas Islam Negeri Sayyidd Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Khasanah, N. (2019). Siyasah Syar'iyah dan Kebijakan Publik di Indonesia: Tinjauan Terhadap UU No. 16 Tahun 2017. *Jurnal Hukum* , 4(1).
- Khoiriyah, S. N. (2019). *Tinjauan fiqh siyasah dalam konsep Wizarah terhadap kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan: studi atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan* [Master Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Latifah, M. (2020). Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society Organizations (CSOs) Based on Law No. 16 of 2007). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(1), 83–103.
- Maulana, R. N. (2023). *ANALISIS FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP SINKRONISASI PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DALAM*

- SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA* [Thesis S1]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Pandeiro, R. M. (2019). KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING. *Lex Et Societatis*, 7(8), 63–72.
- Prayudi. (2018). POLITIK PENGENDALIAN REZIM TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT. *Kajian*, 23(2), 75–93.
- Prayudi, Wasisto, A., Laraswanda, J., & Lindawaty, D. S. (2022). *Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara* (K. Nugroho, Ed.; 1st ed.). Publica Indonesia Utama.
- Priyono, D. P., & Nilamsari, W. (2021). PENYALAHGUNAAN HAK DAN WEWENANG ORGANISASI MASYARAKAT DI KELURAHAN KEDAUNG, TANGERANG SELATAN, BANTEN . *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 253–269.
- Pulungan, S. (2014). *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (N. T. Mukti, Ed.; 1st ed.). Penerbit Ombak.
- Rahayu, D. P., Faisal, Kurnia, A. C., Kusuma Winanda, & Ferdian, K. J. (2021). Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Perspektif Hukum*, 21(2), 184–199.
- Sabri, & Hasan, H. (2020). PELEMAHAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(3), 571–581.
- Samud. (2018). MAQASHID SYARI'AH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI ISLAM. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 45–68.
- Sari, P. (2022). *ANALISIS SIYASAH SYAR'IIYAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERIZINAN REKLAMASI Pantai* [Undergraduate thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Shofiyah, R., Samuji, Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Majid, A. B. A. (2024). Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* , 11(1), 84–93.
- Slamet, K. G. (n.d.). *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*.
- Suhendra, A., & Rahman, F. (2021). Kebebasan Berorganisasi dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2).
- Sumartini, S., Nurwahyuni, & Kholik, S. (2022). Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern . *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224–232.
- Suyanto, W. F. P. (2022). PENERAPAN UANG PAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(3), 474–489.
- Trinanda, D. (2020). Hak Asasi Manusia dan Perppu Ormas (Analisis Perlindungan Hukum Perspektif Siyasah Syariyyah) . *Ijtihad*, 36(2), 92–102.

- Utami, M., & Sugitanata, A. (2024). ANALISIS SIYASAH SYAR'İYAH TERHADAP DINAMIKA KEADILAN DAN DUALITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM SERIAL ANIME ONE PIECE. *JURNAL DARUSSALAM Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* , 4(1), 74–88.
- Wardi, M. K. (2019). ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORMAS (Studi Kasus Putusan Sengketa Administrasi Ormas NW dan HTI) . *Jurnal Juridica*, 1(1), 15–27.
- Winata, M. R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian de Jure*, 18(4), 445–464.